

ABSTRACT

Armed conflicts that are occurred in a state cause many bad consequences included numbers of victims. Humans are often regarded as the only victims that are affected by the armed conflicts. But apparently not only humans, there are also the other living creatures that become the victims of the armed conflicts those are animals included threatened animals. Threatened animals are part of biological diversity that have a high extinction risk level because of the small amount of their populations that requires intensive protection. There are numbers of armed conflicts that happened in the world states where the threatened animals become the victims of it. Threatened animals have to experience the declining of their populations due to the destruction of their habitat, illegal trades of them for financing the conflicts, illegal poaching for their meats, or killed by the weapons that used during the conflicts.

This legal research uses the doctrinal research method by using both the statute approach and the conceptual approach. The results of this research demonstrates that the International Law through the International Environmental Law and International Humanitarian Law have implicitly provided the regulations about threatened animals in the armed conflict area. There are also infractions towards the threatened animals protection obligations in the armed conflicts but the law enforcement have not been done upon all of these infractions.

Keywords: *Threatened Animals, Protection, Regulation, Law Enforcement.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI..... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK x

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah..... 5

 1.3 Tujuan Penelitian 5

 1.4 Manfaat Penelitian 6

 1.5 Metode Penelitian 6

 1.5.1 Tipe Penelitian 6

 1.5.2 Pendekatan (*Approach*)..... 7

 1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*) 7

 1.6 Prosedur Pengumpulan 8

 1.7 Analisis Bahan Hukum 9

1.8	Sistematika Penulisan	9
BAB II PENGATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN SATWA TERANCAM		
	DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA.....	12
2.1	Satwa Terancam Sebagai Satwa yang Dilindungi	12
2.2	Konflik Bersenjata (<i>Armed Conflict</i>).....	17
2.2.1	Konflik Bersenjata Internasional (<i>Interntional Armed Conflict</i>).....	19
2.2.2	Konflik Bersenjata Internal (<i>Internal Armed Conflict</i>).....	21
2.3	Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional	23
2.3.1	Prinsip-Prinsip Perlindungan Satwa Terancam	25
2.3.2	Pengaturan Perlindungan Satwa Terancam	27
2.4	Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	34
2.4.1	<i>Hague Convention IV 1907</i>	36
2.4.2	<i>Geneva Convention 1949</i>	37
2.4.3	<i>Protocol I 1977</i>	38
2.4.4	<i>Protocol II 1977</i>	39
2.4.5	<i>Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977 (ENMOD 1977)</i> . 40	

2.4.6	<i>Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction 1993 atau Chemical Weapon Convention 1993</i>	41
2.4.7	<i>Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction 1997</i>	41

BAB III PELANGGARAN KEWAJIBAN PERLINDUNGAN SATWA

	TERANCAM DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA.....	43
3.1	Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata.....	43
3.1.1	Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo	43
3.1.2	Konflik Bersenjata di Mozambik.....	45
3.1.3	Konflik Bersenjata di Sri Lanka	46
3.1.4	Konflik Bersenjata di India.....	47
3.1.5	Konflik Bersenjata di Nepal	48
3.1.6	Konflik Bersenjata di Sierra Leone	49
3.1.7	Konflik Bersenjata di Vietnam	50
3.2	Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Kewajiban Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata	51
3.2.1	Konsep Penegakan Hukum Internasional	51

3.2.2	Penegakan Hukum Pelanggaran Kewajiban Terhadap Perlindungan Satwa Terancam oleh Organisasi Internasional pada Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo.....	53
3.2.3	Pertanggungjawaban Negara dalam Pelanggaran Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata	59
3.3	Upaya Negara dalam Melakukan Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata.....	64
3.3.1	Melakukan Penegakan Hukum Nasional Terkait Perlindungan Satwa Terancam	64
3.3.2	Melakukan Kerja Sama dengan Negara-Negara Lain	65
3.3.3	Melakukan Konservasi yang Komprehensif Terhadap Satwa Terancam	66
BAB IV PENUTUP		68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69
DAFTAR BACAAN.....		70